

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I. Latar Belakang**

Pada era globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, perlindungan terhadap hak-hak pekerja menjadi perhatian utama dalam hukum ketenagakerjaan. Salah satu aspek penting yang diatur dalam hukum ketenagakerjaan adalah ketentuan mengenai upah minimum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja, memastikan keadilan dalam hubungan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan standar minimum yang harus dibayar kepada pekerja.

Namun, dalam kenyataannya, masih terjadi kasus di mana perusahaan tidak mematuhi ketentuan upah minimum yang berlaku. Pelanggaran ini dapat memiliki dampak serius, baik bagi pekerja yang menerima upah di bawah standar minimum, maupun bagi perusahaan yang melanggar aturan hukum ketenagakerjaan.

Salah satu kasus yang menarik perhatian dalam konteks ini adalah kasus Panca Puji Bangun, sebuah perusahaan yang diduga melanggar ketentuan UMP dan membayar upah di bawah standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Studi kasus ini memberikan gambaran nyata tentang konsekuensi hukum yang dihadapi oleh perusahaan dalam pelanggaran tersebut.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap konsekuensi hukum atas perusahaan yang membayar upah di bawah UMP berdasarkan studi kasus Panca Puji Bangun. Dalam jurnal ini, akan dilakukan analisis terhadap peraturan hukum yang berlaku terkait UMP dan sanksi pelanggaran yang mungkin diterapkan.

Selain itu, penelitian ini juga akan membahas dampak pelanggaran tersebut terhadap perusahaan, pekerja yang terlibat, serta implikasi sosial dan ekonomi yang mungkin timbul akibat pelanggaran tersebut.

Dengan melihat studi kasus Panca Puji Bangun, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsekuensi hukum dari pelanggaran pembayaran upah di bawah UMP serta memberikan rekomendasi atau pembelajaran yang dapat menjadi dasar untuk mencegah dan menangani kasus serupa di masa mendatang.

## II Rumusan Masalah

- a. Bagaimana definisi upah pekerja minimum di Indonesia berdasarkan perundang-undangan yang berlaku?
- b. Bagaimana konsekuensi hukum atas pelanggaran pembayaran upah pekerja minimum?
- c. Kasus apa yang terjadi berkaitan dengan pelanggaran pembayaran upah pekerja minimum?